

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

II.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan I

Kegiatan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan Tahun 2025 Triwulan I juga merupakan rakor TPID dalam rangka menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 484/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bintan **(SK : lampiran 1)**.

Pengendalian inflasi Kabupaten Bintan oleh OPD :

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
3. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
4. Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan Rakor TPID yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Bintan pada pukul 09.00 s.d 12.00 Wib yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan **(data pendukung : lampiran 2)**.

Adapun hasil pelaksanaan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan tersebut menghasilkan:

1. Paparan Penanganan Inflasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
2. Pemantauan stok dan harga pangan Kabupaten Bintan yang disampaikan oleh Kepala DKPP Bintan.
3. Pemantauan Harga Bapokting DKUPP Kabupaten Bintan
4. Progres Program Kegiatan OPD Tahun 2025 dan rencana strategis dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2025.
- 5.

II.2 Program Kegiatan OPD Kabupaten Bintan pada Triwulan I

1. **DKUPP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan :**
2. Pemantauan harga dan stok bapokting pada pelaku distribusi berupa laporan harian bapokting serta laporan stok barang perbulan.
3. Kegiatan Operasi Pasar Murah dan Penyeimbang
4. Pelatihan Kewirausahaan untuk UMKM
5. Program Subsidi Bunga 0% untuk UMKM
6. Peningkatan Kapasitas dan Legalitas UMKM
7. **DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan :**
8. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan di pasar tradisional dan ritel modern.

3. **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan :**

- 4. Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 5. Pengelolaan Perikanan Budidaya

6. **Dinas Sosial Kabupaten Bintan :**

- 7. Bantuan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) P3KE
- 8. Program Pemberdayaan Usaha Mikro
- 9. Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial

5. **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan :**

- 6. Optimalisasi Tol Laut
- 7. Transportasi Perintis

- 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan I

Kegiatan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan Tahun 2025 Triwulan I juga merupakan rakor TPID dalam rangka menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 484/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bintan **(SK : lampiran 1)**.

Pengendalian inflasi Kabupaten Bintan oleh OPD :

- 1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
- 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
- 3. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- 4. Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan Rakor TPID yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Bintan pada pukul 09.00 s.d 12.00 Wib yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan **(data pendukung : lampiran 2)**.

Adapun hasil pelaksanaan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan tersebut menghasilkan:

- 1. Paparan Penanganan Inflasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- 2. Pemantauan stok dan harga pangan Kabupaten Bintan yang disampaikan oleh Kepala DKPP Bintan.
- 3. Pemantauan Harga Bapokting DKUPP Kabupaten Bintan
- 4. Progres Program Kegiatan OPD Tahun 2025 dan rencana strategis dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Adha Tahun 2025.
- 5.

II.2 Program Kegiatan OPD Kabupaten Bintan pada Triwulan I

1. DKUPP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan :

2. Pemantauan harga dan stok bapakting pada pelaku distribusi berupa laporan harian bapakting serta laporan stok barang perbulan.
3. Kegiatan Operasi Pasar Murah dan Penyeimbang
4. Pelatihan Kewirausahaan untuk UMKM
5. Program Subsidi Bunga 0% untuk UMKM
6. Peningkatan Kapasitas dan Legalitas UMKM

2. DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan :

3. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan di pasar tradisional dan ritel modern.

3. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan :

4. Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Pengelolaan Perikanan Budidaya

6. Dinas Sosial Kabupaten Bintan :

7. Bantuan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) P3KE
8. Program Pemberdayaan Usaha Mikro
9. Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan :

6. Optimalisasi Tol Laut
7. Transportasi Perintis

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

I.2.1 Lokasi

Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 dilaksanakan oleh OPD dengan lokasi di Kabupaten Bintan dengan sasaran masyarakat yang menduduki wilayah tempat program / kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

KEGIATAN

II.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 484/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bintan **(SK : lampiran 1).**

Pengendalian inflasi Kabupaten Bintan oleh OPD :

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan.
3. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
4. Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan Rakor TPID yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025 di Ruang Rapat 3 Kantor Bupati Bintan pada pukul 09.00 s.d 12.00 Wib yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan **(data pendukung : lampiran 2).**

Adapun hasil pelaksanaan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan tersebut menghasilkan:

1. Pemantauan stok dan harga Kabupaten Bintan yang disampaikan oleh Kepala DKUPP Bintan.
2. Progres Program Kegiatan OPD Tahun 2025.
- 3.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

II.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan IV

1. Waktu dan Tempat

- **Hari/Tanggal:** Selasa, 16 Desember 2025
- **Waktu:** 00 WIB s.d Selesai
- **Tempat:** Aula Kantor Bupati Bintan

1. Peserta Rapat

Peserta rapat terdiri dari perwakilan:

1. Bupati Bintan;
2. Wakil Bupati Bintan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan;
4. Komandan Kodim 0315 Tanjungpinang;
5. Kapolres Bintan;

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan;

- 6.
7. Komandan Lanud RHF Tanjungpinang;
8. Komandan Lanal Bintan;
9. Komandan Fasharkan Mentigi;
10. Komandan Satrad 106 Tanjungpinang;
11. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang;
12. Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kepri;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
14. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bintan;
15. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan;
16. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan;
17. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau;
18. Sales Branch Manager Pertamina Kepulauan Riau;
19. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bintan;
20. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bintan;
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
22. Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
23. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan;
24. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan;
27. Kadis Perikanan Kabupaten Bintan;
28. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan;
31. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan;

32.Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;

33.Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan;

34.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan;

35.Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bintan;

36.Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

37.Kepala Bea Cukai Tanjung Uban;

38.Kepala Karantina Kesehatan Tanjungpinang;

39.Kepala KSOP Kelas I Tanjung Uban;

40.Kepala KSOP Kelas III Kijang;

41.Kepala ASDP Tanjung Uban;

42.Pimpinan PT. Pelindo Kijang;

43.Kepala KPLP Tanjung Uban;

44.Kepala BASARNAS Tanjungpinang;

45.Kepala BMKG Tanjungpinang;

46.Kepala BPS Kabupaten Bintan;

47.Kepala BULOG Tanjungpinang;

1. Agenda Rapat

2. Kesiapan daerah menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
3. Langkah pengamanan, ketertiban umum, dan pelayanan publik.
4. Paparan kondisi harga kebutuhan pokok dan strategi pengendalian inflasi.
5. Koordinasi lintas instansi terkait transportasi, energi, kesehatan, dan distribusi pangan.

5. Hal-hal penting lainnya.

6. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bintan, disepakati beberapa poin penting sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi antarunsur pimpinan daerah dalam mendukung stabilitas daerah, khususnya pada aspek pengendalian inflasi, ketertiban umum, dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

1. Hasil rapat menyepakati bahwa seluruh unsur FORKOPIMDA berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Bintan. Pemantauan kondisi pasar dan distribusi barang kebutuhan pokok akan terus dilakukan secara berkala guna mengantisipasi potensi gejolak harga serta mencegah terjadinya

kelangkaan barang.

2. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi gangguan distribusi, termasuk penguatan pengawasan di lapangan dan penertiban terhadap praktik yang dapat mengganggu stabilitas harga dan pasokan. Aparat terkait diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah serta memastikan kelancaran arus barang, khususnya pada komoditas strategis.
3. FORKOPIMDA Kabupaten Bintan juga mendorong optimalisasi peran perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi, seperti Operasi Pasar dan pemantauan harga, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
4. Secara keseluruhan, hasil Rapat Pembahasan FORKOPIMDA Kabupaten Bintan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas daerah melalui penguatan koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang berkelanjutan, guna mendukung terciptanya kondisi ekonomi dan sosial yang aman, stabil, dan kondusif.

5. **Penutup**

Demikian hasil dan pembahasan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bintan yang telah dilaksanakan. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh unsur FORKOPIMDA dapat terus meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan.

Penutup ini menjadi penegasan atas pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Seluruh pihak diharapkan dapat menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, serta berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama, FORKOPIMDA Kabupaten Bintan diharapkan mampu terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kabupaten Bintan yang aman, stabil, dan sejahtera.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 484/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bintan **(SK : lampiran 1)**.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Kelembagaan & Koordinasi TPID

Tujuan: Memastikan sinergi seluruh instansi terkait agar respons terhadap tekanan inflasi cepat dan tepat.

Kebijakan:

- Memperkuat struktur dan peran TPID di Kabupaten Bintan sesuai aturan TPID di tingkat kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan rapat koordinasi mingguan bersama BPS, Dinas Perdagangan, Pertanian, Perikanan, dan OPD lain untuk memantau harga, stok, dan distribusi barang.
- Integrasi data harga dan stok komoditas pokok secara real-time dengan BPS untuk deteksi

dini tekanan harga.

Manfaat: Mengoptimalkan pemantauan komoditas utama penyumbang inflasi seperti pangan dan bahan bakar.

□

□ 2. Stabilitas Harga Pangan

Tujuan: Menekan inflasi pangan yang biasanya menjadi pendorong utama inflasi di daerah.

Kebijakan:

- Melaksanakan operasi pasar murah berkala di pasar tradisional untuk kebutuhan pokok jika terjadi kenaikan harga sewaktu-waktu.
- Menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memastikan pasokan stabil ke Bintan dan sekitarnya.
- Menyusun program cadangan pangan lokal/penyimpanan buffer stock di gudang daerah.

Manfaat: Menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok bagi masyarakat dan mencegah lonjakan harga tajam.

□

□ 3. Peningkatan Pasokan dan Distribusi

Tujuan: Mengurangi tekanan harga akibat pasokan tidak lancar atau keterlambatan distribusi.

Kebijakan:

- Optimalisasi infrastruktur logistik dan transportasi untuk memastikan distribusi komoditas sampai ke pasar desa/kelurahan dengan efisien.
- Menyediakan subsidi transportasi bagi pedagang kecil saat lonjakan harga atau pasokan langka.
- Fasilitasi dialog antara pelaku distribusi, trader, dan asosiasi pedagang untuk mengidentifikasi hambatan distribusi dan solusi bersama.

Manfaat: Mengurangi potensi gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.

□

□ 4. Pemanfaatan Anggaran Daerah untuk Pengendalian Inflasi

Tujuan: Mempercepat respons daerah terhadap tekanan inflasi tanpa hambatan administratif.

Kebijakan:

- Memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (Belanja Tak Terduga / BTT) atau kontinjensi untuk program penstabilan harga, seperti subsidi transportasi, pasar murah, atau pengadaan cadangan komoditas.
- Anggarkan dana dalam APBD khusus untuk kegiatan pemantauan, edukasi publik, dan pengendalian harga strategis.

Manfaat: Memberi fleksibilitas anggaran agar TPID dapat bertindak cepat saat harga naik.

□

□ 5. Pemantauan dan Penindakan Praktik Usaha Tidak Wajar

Tujuan: Mencegah praktik yang menimbulkan kenaikan harga tidak wajar seperti penimbunan

atau monopoli.

Kebijakan:

- Melakukan inspeksi pasar, distributor, dan agen bahan pokok secara rutin untuk mencegah penimbunan barang.
- Bekerja sama dengan aparat terkait melakukan tindakan tegas sesuai hukum jika ditemukan praktik anti-kompetitif yang merugikan konsumen.

Manfaat: Menjaga fungsi pasar berjalan efisien dan mencegah harga “dipaksa” naik oleh oknum tidak bertanggung jawab.